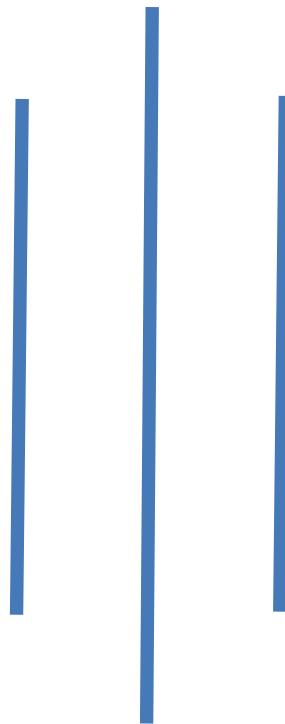




**RANKHIR RENJA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**  
**DAN PERDAGANGAN**  
**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap , terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu Tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, sedangkan Rankhir Rencana Kerja (Renja)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Rankhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun ke depan Rankhir Rencana Kerja (Renja)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rankhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Demikian kami berharap dengan disusunnya Rankhir Rencana Kerja (Renja)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selama satu tahun ke depan.

Mojokerto, Juni 2023

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MOJOKERTO



**M. IWAN ABDILLAH,SH.S.Sos,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. ....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. ....	37
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	74
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	74
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	76
3.3 Program dan Kegiatan.....	78
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	111
4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	111
BAB 5 PENUTUP .....	128

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 (Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) .....	7
Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) .....	30
Tabel 2.3 (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) .....	38
Tabel 2.4 (Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) .....	73
Tabel 3.1 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) .....	82
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Kab. Mojokerto .....	112

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan Ranwal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD , yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
17. Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rankhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembangunan daerah;

Adapun tujuan disusunnya Rankhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam jangka 1 tahun ;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan khususnya pada urusan perindustrian dan perdagangan.

Penyusunan Rankhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan ditahun sebelumnya dan perubahan program / kegiatan di tahun sebelumnya yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja tahun 2024

Adapun tujuan disusunnya Rankhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah untuk memasukan program / kegiatan yang terdapat di Renja kedalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) Tahun 2024

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB 2**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

##### **Perangkat Daerah.**

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini, berpedoman Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026, hasil evaluasi renja tahun 2022, serta hasil evaluasi hasil renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Hasil evaluasi renja tahun 2022 dan 2023 tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp.17.693.137.562, dan terealisasi sebesar Rp.15.138.806.535 atau capaian realisasi anggaran sebesar 85,56%. Sedangkan pada Tahun 2023, pelaksanaan program/kegiatan didukung dengan anggaran sebesar Rp 11.692.435.052,-.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Semester 1 )	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (B)	82 (BB)	80 (B)	82 (BB)	100%	80 (B)	-	-

								<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>100 %</b>	<b>90 %</b>	<b>270 %</b>	<b>90 %</b>
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100 %	3 Dok	9 Dok	300 %
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %
								<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>86 %</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>100 %</b>	<b>85 %</b>	<b>255 %</b>	<b>264 %</b>
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100 %	14 bulan	42 bulan	300 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

							<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	65,57 %	-	-	-	-	-	-	0
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai Disperindag yang mendapatkan pakaian dinas	53 Orang	-	-	-	-	-	-	
							<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan : Kursi kerja pejabat dan meja rapat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100 %	18 Unit	54 Unit	300 %
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Mamin yang Di Sediakan	240 Kotak	356 ktk	356 ktk	356 ktk	100 %	356 ktk	1.308 kotak	545 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	130.802 lbr	130.802 lbr	130.802 lbr	130.802 lbr	100 %	130.802 lbr	292.406 lbr	300 %
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	300 %
								Penyediaan Bahan / Material	Jenis ATK yang di Sediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	12 Paket	300 %
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kudapan yang Di Sediakan	175 kotak	100 kotak	100 kotak	100 kotak	100 %	175 kotak	375 kotak	214 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah	172 kali	172 kali	172 kali	172 kali	100 %	172 kali	516 kali	300 %
							<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>100 %</b>	<b>90 %</b>	<b>270 %</b>	<b>300 %</b>
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	300 %
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan	9 Orang	9 orang	9 orang	9 orang	100 %	9 orang	27 orang	300 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

								<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>100 %</b>	<b>90 %</b>	<b>270 %</b>	<b>300 %</b>
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	809 Unit	809 unit	809 unit	809 unit	100 %	809 unit	2.427 unit	300 %
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	100 %	4 Gedung	12 Gedung	300 %
								Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	63 Unit	300 %
								<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase sarana distribusi perdagangan</b>	<b>93%</b>	45%	45%	45%	50%	<b>93%</b>	45%	50%

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024



								Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	70 Orang	70 Orang	70 orang	- 70 Orang	100%	70 Orang	70 orang	100%
								<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>	<b>100%</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>	<b>100%</b>
								<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase ketersediaan barang kebutuhan pokok</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
								Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	<b>Jumlah Pasar yang di Monitoring</b>	<b>4 Pasar</b>	4 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	100%	<b>4 Pasar</b>	4 Pasar	100%

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

								Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang di Operasi Pasar	9 Pasar	9 Pasar	9 Pasar	9 Pasar	100%	9 Pasar	9 Pasar	100%
								<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase Pertumbuhan Ekspor	15%	7,5%	7,5%	7,5%	50%	15%	7,5%	50%
								<b>Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Satu Daerah	4 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	50%	4 Kali	2 Kali	50%
								Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah misi dagang yang diiku	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 kali	100%

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

								Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Jumlah Peserta Workshop Ekspor untuk IKM Potensial Kab. Mojokerto	25 Orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	25 Orang	25 orang	100%
								Pameran dagang nasional	Jumlah Pameran dagang nasional	2 Kali	2kali	2 kali	2 kali	100%	2 Kali	2 kali	100%
								Pembinaan pelaku usaha ekspor	jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor	25 Orang-	-	-			25 Orang		
								<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	94%	45%	45%	45%	50%	94%	45%	50%
									Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%	5%	5%	5%	100%	5%	5%	100%

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024







								Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang terdata	10 Perusahaan	10	10	10	10	100	10	10	100
								<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Tingkat Pertumbuhan Industri</b>	1%	1	1	1	1	100	1	100	
								Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan produktivitas IKM	3%	3	3	3	3	100	3	100	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Standar Produk	140 IKM	140	140	140	140	100	140	100	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas standarisasi produk	405 IKM	405	405	405	405	100	405	100	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

								<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapo r data Industri</b>	<b>55%</b>	55	55	55	55	100	55	100
								Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas	120 Indr	120	120	120	120	100	120	100
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI ,IPI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri yang diawasi	120 indr	120	120	120	120	100	120	100
								<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini</b>	<b>50%</b>	50	50	50	50	100	50	100

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

								Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	pengumpulan data industri berbasis sistem informasi	5 Kecamatan	5	5	5	5	5	100	5	100
								Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIInas)	Jumlah indsutri yang didata dan dipetakan	5 Kecamatan	5	5	5	5	5	100	5	100

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut di atas terlihat bahwa kinerja pelaksanaan renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat dikatakan cukup efektif dan efisien. Capaian kinerja realisasi anggaran pada Tahun 2022 adalah sebesar 85,6%, sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 secara garis besar mencapai > 101 %. Berikut gambaran umum pencapaian kinerja program/kegiatan Tahun 2022 :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar dengan anggaran sebesar Rp. 5.283.108.270 yang didukung dengan terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 99,85 %
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indicator Tingkat Stabilisasi Harga Barang Pokok & Penting yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 363.770.000 terdiri dari 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 106 %
- c. Program Pengembangan Ekspor dengan indikator persentase pertumbuhan ekspor yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 144.000.383 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 5,6 %

- d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan 2 indikator meliputi persentase alat UTTP yang ditera – tera ulang dalam tahun berjalan & persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku didukung dengan anggaran sebesar Rp. 766.057.237 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 94,36 %
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator persentase UMKM yang berkembang omzetnya didukung dengan anggaran sebesar Rp. 313.690.200 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 66 %
- f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indicator tingkat pertumbuhan industri dengan anggaran sebesar Rp. 2.255.540.200 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 30 %
- g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indicator Tingkat Kepatuhan Industri untuk tertib lapor data industri
- h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indicator Tingkat Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 100%
- i. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indicator tingkat pertumbuhan industri dengan anggaran sebesar Rp. 2.255.540.200 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 30 %

Sedangkan pada Tahun 2022, pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran sebesar Rp 17.693.137.562 (termasuk PAPBD 2022). Program yang dilaksanakan sebanyak 10 program dan 18

kegiatan. Dan diproyeksikan pada Tahun 2022 capaian kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat mencapai angka >80%.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menghendaki terjadinya perubahan paradigma birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan Kinerja Birokrasi dalam melayani publik secara total melalui aspek responsibilitas. Para pengemban tugas pemerintahan dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pihak yang dilayani masyarakat.

Demikian pula bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada urusan perindustrian dan perdagangan, diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat khususnya terkait pelayanan perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Bina Usaha Perdagangan, Bina ILMATET dan Bina Industri Agro dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

### **1. BIDANG ILMATET**

Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka tekstil, Alat transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri Logam dan Mesin, Industri Aneka dan Tekstil serta Indutri alat transprtasi, elektronika dan telematika.

## **2. BIDANG INDUSTRI AGRO DAN KIMIA**

Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi Industri Kimia hulu dan hilir, Industri makanan minuman, dan tembakau serta industri hasil hutan dan perkebunan.

## **3. BIDANG USAHA PERDAGANGAN**

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi bina pasar dan distribusi, Promosi peningkatan penggunaan Produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor dan impor.

## **4. BIDANG METROLOGI LEGAL**

Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi prasarana dan sarana metrologi legal. Pembinaan dan Penyuluhan serta pengawasan.

Indikator-indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kebijakan-kebijakan nasional yang terkait, menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan. Evaluasi atas hasil capaian kinerja pelayanan diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja tahun selanjutnya. Berikut hasil evaluasi atas capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindag

Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PDRB katagori perdagangan	-	-	-	-	-	-			10,40%	10,41%	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021
	PDRB Katagori Industri Pengolahan									53,15%	53,16%	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021

	Persentase Angka Perdagangan Dalam Daerah (Ekspor)										<b>5%</b>	<b>5%</b>	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021
	Indeks Daya Beli										<b>0,789%</b>	<b>0,789%</b>	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021
	Persentase Industri Kecil Menengah Naik Kelas										<b>3%</b>	<b>3%</b>	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021

Berdasarkan tabel hasil evaluasi kinerja pelayanan tersebut, terlihat bahwa pada Tahun 2021 dan 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2021, PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan mampu memberikan kontribusi sebesar 6.94% terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pada kategori perdagangan besar, eceran, mampu memberikan kontribusi sebesar 5.95%. Nilai neraca perdagangan pada Tahun 2021 menunjukkan angka positif dimana pertumbuhan ekspor Kabupaten Mojokerto lebih tinggi dibanding impor yaitu berkisar pada angka 18.48%. Pada Bidang kemeterologian juga menunjukkan kinerja yang baik, dimana pada Tahun 2021 mampu berkontribusi sebesar 111,77 % terhadap PAD. Kinerja urusan perindustrian juga dapat dikatakan baik, dimana pada Tahun 2021 kapasitas produksi industri pengolahan meningkat sebesar 52,16.%, dengan tingkat pertumbuhan industri sebesar 1,10%.

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan nasional penyusunan RPIK disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah, RTRW provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian, keseimbangan dengan kebijakan pembangunan, sosial serta daya dukung lingkungan. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan kepada pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota untuk menyusun RPIP dan RPIK yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan kebijakan industrial nasional.

2. Masih tingginya angka impor dalam ulasannya Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan ini impor dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama adanya pelemahan rupiah terhadap dolar AS sehingga mempengaruhi peningkatan nilai impor dibanding ekspor. Pasalnya ketergantungan impor bahan baku untuk industri yang tinggi membuat harga barang lebih mahal. Namun kondisi ini tidak membuat impor dikurangi karena memang dibutuhkan. “Kedua, kenaikan impor ini akibat menjelang Ramadan dan lebaran, impor bahan pangan juga meningkat, itu sebabnya impor golongan sereal meningkat,” sebutnya. Faktor ketiga ialah peningkatan impor minyak menjelang ramadhan dan lebaran, dari sisi volume meningkat, selain itu harganya juga naik. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengaku kondisi ini tidak biasa terjadi di mana kebutuhan bahan baku dan modal meningkat. Biasanya peningkatan dua golongan itu terjadi 2 atau 3 bulan menjelang Ramadan untuk mengantisipasi kebutuhan industri saat libur panjang lebaran.
3. Revolusi Industri 4.0 memaksa agar OPD khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat memaksimalkan kinerja yang berbasis teknologi informasi. Selain itu untuk penerapan Revolusi Industri 4.0 di Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan mengadakan program e-smart IKM. Program ini berupa pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM).
4. Kebijakan nasional terkait pengembangan IKM Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2021 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM

memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2023 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2013 s.d 2023 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%. Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan

kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.

Selain isu strategis tersebut di atas, dalam upaya pencapaian sebuah tujuan organisasi tentunya tak lepas dari beberapa permasalahan dan hambatan, baik yang berasal dari internal organisasi itu sendiri maupun berasal dari faktor eksternal. Berikut beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja:

1. Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Manajemen Modal.
3. Manajemen Pemasaran.

Isu strategis pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang terinci sebagai berikut :

- Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya Clean Government dan Good Governance melalui peningkatan kinerja aparatur maka ditetapkan kebijakan meningkatkan kinerja pegawai/aparatur kearah profesional dan proporsional
- Mengembangkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Industri yang Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah Utamanya Industry Kecil Menengah ( IKM ) dengan Meningkatkan Kemampuan dan Penguasaan Teknologi Tepat Guna( TTG ) bagi IKM melalui Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan serta Pengawasan terhadap proses serta Hasil Produksi Industry, maka ditetapkan kebijakan mendata, mengidentifikasi dan mengelompokan Potensi Produk Industry untuk Sentra Industri Kimia dan Agro (IKA) dan Sentra Industri Kimia dan Agro(IKA) Non Formal untuk diberikan pembinaan maupun bantuan alat yang lebih tepat guna
- Mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik Local, Regional, Nasional dan

Internasional, maka ditetapkan kebijakan mengadakan pengawasan untuk mengetahui barang beredar dan jasa yang ada di pasar guna meningkatkan perlindungan konsumen

- Meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representative dengan meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar maka ditetapkan kebijakan : memberikan fasilitas pasar yang layak untuk tempat bertransaksi.

## **1. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi**

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan dan Hambatan secara Internal terdiri atas :

- a. Sistem pendataan Industri dan Perdagangan belum sepenuhnya dilaporkan secara real time.

2) Permasalahan dan Hambatan secara Eksternal terdiri atas :

- a. Sulitnya mencari Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing
- b. Sulitnya mencari IKM yang di ajak Pelatihan dan Pembinaan SDM agar bisa berdaya saing dalam menghadapi Globalisasi.
- c. Tingginya kebijakan UMK yang berakibat pada berkurangnya jumlah industri besar.

– **Tantangan:**

- a) Tumbuhnya perekonomian yang signifikan dengan berkembangnya industrialisasi
- b) Maraknya perdagangan di Pasar-Pasar Tradisional dan Pasar Modern serta sentra-sentra perdagangan yang tersebar di Kabupaten Mojokerto
- c) Dinamisasi masyarakat segala tingkatan profesi yang semakin kualifait.
- d) Situasi politik dan keamanan kurang kondusif

- e) Perubahan kebutuhan masyarakat terhadap layanan prima semakin meningkat
- f) Meningkatnya persaingan karena belum siapnya pengusaha kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan bebas
- g) Semakin banyaknya produk-produk import menyerbu Pasar Kabupaten Mojokerto
- h) Revolusi industri yang salah satunya berkembangnya perdagangan online.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Salah satu proses yang dilakukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 ini adalah review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, yaitu dengan membandingkan antara rencana program/kegiatan yang tercantum pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Review terhadap rancangan awal RKPD ini diperlukan guna penyelarasan antara dokumen RKPD dengan Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Mojokerto

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto											
No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K	Disperindag	Nilai SAKIP PD	80	9,046,400,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperindag	Nilai SAKIP PD	80	9,046,400,000	

	<b>OTA</b>										
		<b>Disperindag</b>	<b>Persentase Indikator program PD yang tercapai</b>	<b>90%</b>	<b>9,046,400,000</b>		<b>Disperindag</b>	<b>Persentase Indikator program PD yang tercapai</b>	<b>90%</b>	<b>9,046,400,000</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>7 Dok</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>7 Dok</b>	<b>30,000,000</b>	
	<b>Penyusunan Dokumen</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>4 Dokum</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Dokumen yang Di Susun</b>	<b>4 Dokum</b>	<b>15,000,000</b>	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	Perencanaan Perangkat Daerah	dag	yang Di Susun	en	00	Daerah	dag		en	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperin dag	Jumlah Dokumen yang Di Susun	3 Dokumen	15,000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperin dag	Jumlah Dokumen yang Di Susun	3 Dokumen	15,000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperin dag	Persentase Realisasi Anggaran PD	91%	7,715,000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperin dag	Persentase Realisasi Anggaran PD	91%	7,715,000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperin dag	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	49 Orang	7,700,000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperin dag	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	49 Orang	7,700,000,00	
	Penyediaan Administrasi	Disperin	Jumlah laporan	12 Lapora	15,000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disperin	Jumlah laporan yang Di Susun	12 Lapora	15,000,00	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	<b>Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>dag</b>	<b>yang Di Susun</b>	<b>n</b>	<b>00</b>		<b>dag</b>		<b>n</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Disperindag</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>76%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Disperindag</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>76%</b>	<b>110,000,000</b>	
	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas pegawai</b>	<b>58 stel</b>	<b>20,000,000</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas pegawai</b>	<b>58 stel</b>	<b>20,000,000</b>	
	<b>Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah kegiatan monitoring pegawai</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah kegiatan monitoring pegawai</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>15,000,000</b>	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>25,000,000</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>25,000,000</b>	
	<b>Sosialisasi Peraturan Perundang - undang</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Pedagang yang mengikuti sosialisasi/Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan</b>	<b>165 Pegawai</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Sosialisasi Peraturan Perundang - undang</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Pedagang yang mengikuti sosialisasi/Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan</b>	<b>165 Pegawai</b>	<b>50,000,000</b>	
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>		

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Disperindag			-		Disperindag			-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperindag	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	324,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperindag	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	324,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperindag	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Unit	80,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperindag	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Unit	80,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperindag	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	300 Kotak	27,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperindag	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	300 Kotak	27,500,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperindag	Jumlah jenis barang yang dicetak & digandakan	2 jenis	40,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperindag	Jumlah jenis barang yang dicetak & digandakan	2 jenis	40,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Disperindag	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	4 Paket	30,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Disperindag	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	4 Paket	30,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperindag	Jumlah makan minum	1 Paket	30,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperindag	Jumlah makan minum yang diadakan	1 Paket	30,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

			yang diadakan								
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Se-Kab Mojokerto	Jumlah waktu Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 bulan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Se-Kab Mojokerto	Jumlah waktu Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 bulan	100,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Disperindag	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan	12 Bulan	16,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Disperindag	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan	16,500,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

			peraturan perundang - undangan								
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	495,600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	495,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperindag	Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi,	12 Bulan	357,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperindag	Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	357000000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

			sumber daya air dan listrik								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperin dag	Jumlah Penyediaan jasa tenaga kerja	9 Orang	138,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperin dag	Jumlah Penyediaan jasa tenaga kerja	9 Orang	138,600,000	
6	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperin dag	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	151,800,000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperin dag	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	151,800,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Disperin dag	Jumlah pajak kendaraan	18 Unit	55,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Disperin dag	Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas	18 Unit	55,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

<b>Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>		<b>perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</b>			<b>dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>		<b>atau kendaraan dinas jabatan</b>			
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah pajak kendaraan dinas /operasional yang terbayar</b>	<b>18 Unit</b>	<b>19,800,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah pajak kendaraan dinas /operasional yang terbayar</b>	<b>18 Unit</b>	<b>19,800,000</b>	

	<b>Operasional atau Lapangan</b>										
	<b>Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor</b>	<b>2 Gedung</b>	<b>55,000,000</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor</b>	<b>2 Gedung</b>	<b>55,000,000</b>	
	<b>Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung</b>	<b>20 Unit</b>	<b>22,000,000</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	<b>20 Unit</b>	<b>22,000,000</b>	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	Bangunan Lainnya		Kantor								
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperindag	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	220,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperindag	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	220,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	20,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	200,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	200,000,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperindag	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar	93%	6,661,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperindag	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar	93%	6,661,000,000	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun	93%	5,470,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun dan terkelola	93%	5,470,000,000	

			dan terkelola								
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	1 Paket	4,000,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	1 Paket	4,000,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	persentase sarana distribusi perdagangan dengan konstruksi baik	100%	1,470,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	persentase sarana distribusi perdagangan dengan konstruksi baik	100%	1,470,000,000	

2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Se-Kab Mojokerto	Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100%	1,191,000,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Se-Kab Mojokerto	Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100%	1,191,000,000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pasar yang dikelola	10 pasar	1,191,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pasar yang dikelola	10 pasar	1,191,000,000	

<b>II</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>Se-Kab</b>	<b>Tingkat</b>	<b>29%</b>		<b>PROGRAM STABILISASI</b>	<b>Se-Kab</b>	<b>Tingkat Stabilitas</b>	<b>29%</b>		
<b>I</b>	<b>STABILISASI</b>	<b>Mojoker</b>	<b>Stabilitas</b>		<b>165,275,</b>	<b>HARGA BARANG</b>	<b>Mojokert</b>	<b>Harga Barang</b>		<b>165,275,0</b>	
	<b>HARGA</b>	<b>to</b>	<b>Harga</b>		<b>000</b>	<b>KEBUTUHAN POKOK</b>	<b>o</b>	<b>Kebutuhan Pokok dan</b>		<b>00</b>	
	<b>BARANG</b>		<b>Barang</b>			<b>DAN BARANG PENTING</b>		<b>Barang Penting</b>			
	<b>KEBUTUHAN</b>		<b>Kebutuhan</b>								
	<b>POKOK DAN</b>		<b>Pokok dan</b>								
	<b>BARANG</b>		<b>Barang</b>								
	<b>PENTING</b>		<b>Penting</b>								
<b>1</b>	<b>Menjamin</b>	<b>Se-Kab</b>	<b>Persentase</b>	<b>29%</b>		<b>Menjamin Ketersediaan</b>	<b>Se-Kab</b>	<b>Persentase</b>	<b>29%</b>		
	<b>Ketersediaan</b>	<b>Mojoker</b>	<b>ketersediaa</b>		<b>165,275,</b>	<b>Barang Kebutuhan</b>	<b>Mojokert</b>	<b>ketersediaan barang</b>		<b>165,275,0</b>	
	<b>Barang</b>	<b>to</b>	<b>n barang</b>		<b>000</b>	<b>Pokok dan Barang</b>	<b>o</b>	<b>kebutuhan pokok</b>		<b>00</b>	
	<b>Kebutuhan</b>		<b>kebutuhan</b>			<b>Penting di tingkat</b>					
	<b>Pokok dan</b>		<b>pokok</b>			<b>Daerah</b>					
	<b>Barang</b>					<b>Kabupaten/ Kota</b>					
	<b>Penting di</b>										
	<b>tingkat</b>										
	<b>Daerah</b>										

	<b>Kabupaten/ Kota</b>										
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah Pasar yang dimonitoring terkait dengan pelaporan sembako</b>	<b>9 Pasar</b>	<b>55,088,000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah Pasar yang dimonitoring terkait dengan pelaporan sembako</b>	<b>9 Pasar</b>	<b>55,088,000</b>	
	<b>Pengendalian Ketersediaan</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah Pasar yang</b>	<b>9 Pasar</b>	<b>110,187,</b>	<b>Pengendalian Ketersediaan Barang</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah Pasar yang di Operasi Pasar</b>	<b>9 Pasar</b>	<b>110,187,0</b>	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	to	di Operasi Pasar		000	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	o			00	
I V	PROGRAM PENGEMBAN GAN EKSPOR	Se-Kab Mojoker to	Persentase Pertumbuh an Ekspor	5%	404,000, 000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Se-Kab Mojokert o	Persentase Pertumbuhan Ekspor	5%	404,000,0 00	
1	Penyelenggara an Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Se-Kab Mojoker to	Persentase pertumbuh an IKM potensi Ekspor	33%	404,000, 000	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Se-Kab Mojokert o	Persentase pertumbuhan IKM potensi Ekspor	33%	404,000,0 00	

yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah misi dagang yang diikuti	2 Kali	100,000,000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah misi dagang yang diikuti	2 Kali	100,000,000		
Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Peserta Workshop Ekspor untuk IKM Potensial Kab. Mojokerto	25 Orang	140,000,000	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Peserta Workshop Ekspor untuk IKM Potensial Kab. Mojokerto	25 Orang	140,000,000		

	Pameran dagang nasional	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pameran dagang nasional	2 Kali	140,000,000	Pameran dagang nasional	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pameran dagang nasional	2 Kali	140,000,000	
	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Se-Kab Mojokerto	jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor	25 Orang	24,000,000	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Se-Kab Mojokerto	jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor	25 Orang	24,000,000	
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Se-Kab Mojokerto	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	94%	1,825,030,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Se-Kab Mojokerto	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	94%	1,825,030,000	

			Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%				Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%		
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Se-Kab Mojokerto	Persentase wajib tera yang terlayani/ indeks kepuasan terhadap pelayanan tera dan	94,37%	1,825,030,000	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Se-Kab Mojokerto	Persentase wajib tera yang terlayani/ indeks kepuasan terhadap pelayanan tera dan tera ulang	94,37%	1,825,030,000	

			tera ulang								
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Se-Kab Mojokerto	Jumlah alat pendukung pelayanan UTPP	1 Ruang Lingkup	1,129,536,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Se-Kab Mojokerto	Jumlah alat pendukung pelayanan UTPP	1 Ruang Lingkup	1,129,536,000	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Alat UTPP yang belum dan yang sudah ditera	56.000 UTPP	645,494,000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Alat UTPP yang belum dan yang sudah ditera	56.000 UTPP	645,494,000	
	Penyidikan Metrologi Legal	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Obyek penyidikan metrologi	2 Obyek	50,000,000	Penyidikan Metrologi Legal	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Obyek penyidikan metrologi legal	2 Obyek	50,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

			legal								
V	PROGRAM PENGUNAA N DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperin dag	Persentase UMKM yang berkembangan g omzetnya	60%	690,000, 000	PROGRAM PENGUNAAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperin dag	Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	60%	690,000,0 00	
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Se-Kab Mojoker to	Presentase UMKM yang berkembangan g Omsetnya	60%	690,000, 000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Se-Kab Mojokert o	Presentase UMKM yang berkembang Omsetnya	60%	690,000,0 00	

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Promosi Potensi Daerah yang diikuti	4 Kali	350,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Promosi Potensi Daerah yang diikuti	4 Kali	350,000,000	
Pembinaan terhadap pedagang / pelaku usaha produk dalam negeri	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	4 Kali	120,000,000	Pembinaan terhadap pedagang / pelaku usaha produk dalam negeri	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	4 Kali	120,000,000	
Peningkatan Sistim dan	Disperindag	Jumlah UMKM	140 UMKM	120,000,000	Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi	Disperindag	Jumlah UMKM yang terdata dalam sistim	140 UMKM	120,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	Jaringan Informasi Perdagangan		yang terdata dalam sistim		000	Perdagangan				00	
V II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperindag	Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen	15%	20,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperindag	Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen	15%	20,000,000	
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat,	Disperindag	Persentase Penerbitan Tanda Daftar	15%	10,000,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin	Disperindag	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15%	10,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	<b>Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>Gudang</b>			<b>Usaha Toko Swalayan</b>					
	<b>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Toko Modern yang terdata</b>	<b>12 toko modern</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah Toko Modern yang terdata</b>	<b>12 toko modern</b>	<b>10,000,000</b>	

	<b>Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>										
<b>2</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah TDG yang diterbitkan</b>	<b>13 Perusahaan</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah TDG yang diterbitkan</b>	<b>13 Perusahaan</b>	<b>10,000,000</b>	
	<b>Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah perusahaan yang terdata</b>	<b>13 Perusahaan</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Jumlah perusahaan yang terdata</b>	<b>13 Perusahaan</b>	<b>10,000,000</b>	
<b>V II I</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Tingkat Pertumbuhan Industri</b>	<b>2%</b>	<b>1,225,000,000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Tingkat Pertumbuhan Industri</b>	<b>2%</b>	<b>1,225,000,000</b>	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperindag	persentase peningkatan produktivitas IKM	2%	1,225,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperindag	persentase peningkatan produktivitas IKM	2%	1,225,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Se-Kab Mojokerto	Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Standar Produk	200 IKM	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Se-Kab Mojokerto	Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Standar Produk	200 IKM	250,000,000	

	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi standarisasi produk</b>	<b>450 ikm</b>	<b>975,000,000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi standarisasi produk</b>	<b>450 ikm</b>	<b>975,000,000</b>	
<b>I X</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laporan data Industri</b>	<b>55%</b>	<b>118,862,000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Disperindag</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laporan data Industri</b>	<b>55%</b>	<b>118,862,000</b>	

1	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Se-Kab Mojokerto	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas	55%	118,862,000	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Se-Kab Mojokerto	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas	55%	118,862,000	
---	---	------------------	---	-----	-------------	---	------------------	---	-----	-------------	--

<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI ,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah Industri yang diawasi</b>	<b>120 indr</b>	<b>118,862,000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI ,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Se-Kab Mojokerto</b>	<b>Jumlah Industri yang diawasi</b>	<b>120 indr</b>	<b>118,862,000</b>	
--	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------	--

X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperin dag	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	50%	220,000, 000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperin dag	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	50%	220,000,0 00	
1	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Disperin dag	Prosentase pengumpul an data industri berbasis sistem informasi	50%	220,000, 000	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Disperin dag	Prosentase pengumpulan data industri berbasis sistem informasi	50%	220,000,0 00	

<p>Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)</p>	<p>Se-Kab Mojokerto</p>	<p>Jumlah industri yang didata dan dipetakan</p>	<p>5 kecamatan</p>	<p>220,000,000</p>	<p>Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)</p>	<p>Se-Kab Mojokerto</p>	<p>Jumlah industri yang didata dan dipetakan</p>	<p>5 kecamatan</p>	<p>220,000,000</p>	
<p><b>Total</b></p>		<p><b>Total</b></p>								

			<b>12,194,2</b>			<b>12,194,28</b>	
			<b>80,996</b>			<b>0,996</b>	

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rekapitulasi perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , terdapat kebutuhan , dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 8.371.751.189
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.800.450.338
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 105.900.000
4. Program Pengembangan Ekspor dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 138.325.650
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen juga membutuhkan anggaran sebesar Rp. 546.503.400
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 506.095.000
7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 6.975.000
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 547.247.619
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 91.188.000
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 77.850.000

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2024 :

**Tabel 2.4 (Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2024 Kabupaten Mojokerto**

#### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
	Rincian :				
1	permohonan bantuan pengadaan alat konveksi pakaian dan hijab DNA COLLECTION	Pungging/lebaksono	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan alat konveksi pakaian dan hijab	Rp.50.000.000	Kelompok masyarakat belum berbadan hukum dan diusulkan KUB
2	permohonan bantuan pengadaan alat bengkel vespa POKMAS GASSPOLL MOZAR	Mojosari/seduri	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan alat Bengkel vespa	Rp. 40.000.000	Kelompok masyarakat belum berbadan hukum dan diusulkan KUB
3	Pengajuan bantuan usaha Tim Relawan 87 kecamatan trowulan	Trowulan/trowulan		Rp. 75.000.000	Persyaratan kurang lengkap & Dalam pengajuan proposal bantuan dana bukan kewenangan disperindag
4	Permohonan bantuan hibah kelompok masyarakat "Sumber Rejeki Baru"	Sooko/sooko		Rp. 50.000.000	Persyaratan kurang lengkap & Dalam pengajuan proposal bantuan dana bukan kewenangan disperindag

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2024 ada usulan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Pokir Dewan dan dunia usaha.

## BAB 3

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Didalam pembangunan sektor industri terdapat permasalahan permasalahan didalamnya baik masalah internal yaitu masalah di dalam sektor industri itu sendiri maupun masalah eksternal yaitu masalah diluar sektor industri.

Masalah industri tersebut antara lain kurang kuatnya populasi industri baik besar maupun sedang, menyangkut struktur industri nasional dan masalah produktivitas yaitu kurangnya tenaga kerja di industri dalam menciptakan nilai tambah industri.

Sementara itu, permasalahan eksternal industri mencakup (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai; (2) tidak ada pengawasan terhadap produk import terutama produk import ilegal di pasar domestik; (3) hubungan industrial dan tenaga kerja dimasing sektor industri belum terbangun dengan baik; (4) suku bunga perbankan yang masih tinggi.

Disamping permasalahan tersebut, industri nasional menghadapi tantangan dari produk-produk luar negeri yang semakin bebas masuk ke pasar domestik. Untuk itu diperlukan upaya menyeluruh untuk mengamankan pasaran dalam negeri dari serbuan produk-produk yang illegal dan yang tidak memenuhi standar, seta upaya untuk membantu industri nasional meningkatkan daya saingnya baik dari segi harga maupun kualitas.

Peran ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diupayakan untuk terus meningkat, terutama ekspor nonmigas. Oleh sebab itu, untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas dilakukan melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Namun demikian, Kebijakan Perdagangan Luar negeri tersebut akan didukung pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah *roadmap* (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industry 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi. Untuk itu, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era Industry 4.0. Adapun lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human–Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Langkah dasar yang sudah diawali oleh Indonesia, yakni meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program *link and match* antara pendidikan dengan industri. Upaya ini dilaksanakan secara sinergi antara Kemenperin dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Salah satu strategi Indonesia memasuki Industry 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air. Adapun kelima sektor tersebut, yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Otomotif, Industri Elektronik, Industri Kimia, serta Industri Tekstil.

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.

Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi

penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2022 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Tujuan adalah. sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 khususnya pada misi kedua yaitu ***Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan***

Dengan mengacu pada sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini adalah meningkatnya kemandirian keuangan daerah sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu 2021 – 2026, serta dengan memperhatikan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan, maka ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah.

- a. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi .
- b. Meningkatkan PDRB Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran triwulan atau bulanan. Adapun Tabel Sasaran dan Tabel Program dalam Ranwal Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel Sasaran**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja TA. 2023
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	%Angka Perdagangan Dalam Daerah ( Ekspor)	5%
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,789 %
3	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase IKM yang naik kelas	3%

**Tabel Program**

No	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terstandar	93%
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29%
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	5%
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTP yang ditera – tera ulang dalam tahun berjalan	94%
		Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	60%
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki fasilitasi pemenuhan komitmen	15%
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri	2%

9	Program Pengendalian dan Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Industri untuk tertib lapor data industri	55%
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	50%

### 3.3 Program dan Kegiatan.

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota oleh Sekretariat, dan pada Tahun 2024 didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini, telah sesuai dengan Renstra Disperindag Tahun 2021 – 2026 dan SKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Pada dokumen RKPD pagu indikatif yang ditetapkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 8.371.751.189.

#### 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini merupakan salah satu program prioritas untuk mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, pencapaian indikator sasaran persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terstandar. Program ini merupakan program yang baru dilaksanakan pada Tahun 2024, sebagai salah satu wujud upaya efektifitas program agar kinerjanya lebih optimal. Program Peningkatan Distribusi Perdagangan pada tahun 2024 didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1. Pembangunan dan Pngelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ini, telah sesuai (jika sesuai) dengan Renstra Disperindag Tahun 2021 – 2026 dan SKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Pada dokumen RKPD pagu indikatif yang ditetapkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.800.450.338

### **3. Program Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.**

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp. 105.900.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indikator sasaran Tingkat Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan harga penting yang meliputi & didukung 1 kegiatan yaitu:

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah kabupaten/kota

### **4. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp. 138.325.650 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Pertumbuhan Ekspor yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp.548.503.400 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Persentase alat UTP yang ditera – tera ulang dalam tahun berjalan yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang dan Pengawasan

### **6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp. 506.095.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Persentase UMKM yang berkembang Omzetnya yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Promosi , Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

## **7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp. 6.975.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki Fasilitas pemenuhan komitmen yang meliputi & didukung 2 Kegiatan yaitu :

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan izin usaha took swalayan
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang

## **8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp.547.247.619 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Pertumbuhan Industri yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

## **9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp.91.182.800 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapor Data Industri yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri ( IPKI), Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

## **10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp.77.850.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenangan Kab/KotaSecara lebih rinci, rencana program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2025  
Kabupaten Mojokerto

NAMA PD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	80 (B)	8,371,751,189	APBD		80 (B)	8,371,751,189
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		90%	20,000,000	APBD		90%	22,000,000
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	10,000,000	APBD		4 Dokumen	11,000,000

3.30.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	10,000,000	APBD		1 Laporan	11,000,000
3.30.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90%	7,001,538,000	APBD		90%	7,701,691,800
3.30.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		56 Orang	7,001,538,000	APBD		56 Orang	7,701,691,800
3.30.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	232,000,000	APBD		90%	255,200,000
3.30.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	50,000,000	APBD		2 Paket	55,000,000
3.30.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		36 Paket	25,000,000	APBD		36 Paket	27,500,000
3.30.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		36 Paket	40,000,000	APBD		36 Paket	44,000,000
3.30.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	10,000,000			12 Dokumen	11,000,000
3.30.01.2.0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket		2 Paket		APBD		2 Paket	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

6.07		Bahan/Material yang Disediakan			32,000,000				35,200,000
3.30.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	12 Laporan	25,000,000	APBD		12 Laporan	27,500,000
3.30.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		260 Laporan	50,000,000	APBD		260 Laporan	55,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		73%	910,000,996	APBD		73%	1,001,001,095.60
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		1300 Orang	850,000,996	DBHCH T		1300 Orang	935,001,096
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	20,000,000	APBD		1 Paket	22,000,000
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen	16,500,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		4 Orang	25,000,000	APBD		4 Orang	27,500,000
3.30.01.2.0	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Penyediaan		90%		APBD		90%	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

8	Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan			470,000,000				517,000,000
3.30.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	344,000,000	APBD		12 Laporan	378,400,000
3.30.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		108 Laporan	126,000,000	APBD		108 Laporan	138,600,000
3.30.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik		90%	118,000,000	APBD		90%	129,800,000
3.30.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		27 Unit	68,000,000	APBD		27 Unit	74,800,000
3.30.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /rehabilitasi		1 Unit	50,000,000			1 Unit	55,000,000
3.30.01.2.0	Pengadaan Barang Milik	Persentase Pengadaan	Kantor	100%		APBD		100%	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

7	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto		215,000,000				236,500,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 Unit	195,000,000	APBD		1 Unit	214,500,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Unit	20,000,000	APBD		1 Unit	22,000,000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar		92.86%	1,800,450,338	APBD		92.86%	4,086,500,000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun dan terkelola		85,71%	3,015,000,000	APBD		85,71%	3,316,500,000
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		1 Unit	1,870,000,000	APBD		1 Unit	2,057,000,000
	Rincian :								
	Pembangunan Pasar Rakyat Mojosari	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun		1 Lokasi	1,870,000,000	APBD		1 Lokasi	2,057,000,000
3.30.03.2.0	Fasilitasi Pengelolaan Sarana	Jumlah Fasilitasi		14 Unit		APBD		14 Unit	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

1.02	Distribusi Perdagangan	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1,145,000,000				1,259,500,000
	Rincian :								
	Pemeliharaan Kebersihan Pasar	Jumlah Pasar yang dibersihkan		12 Pasar	900,000,000	APBD		12 Pasar	990,000,000
	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Sehat	Jumlah pedagang yang dibina		12 Pasar	100,000,000	APBD		12 Pasar	110,000,000
	Operasionalisasi Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan ( PPST )	Jumlah Waktu Operasionla PPST		12 Bulan	30,000,000	APBD		12 Bulan	33,000,000
	Operasional UPT Pasar	Jumlah operasional UPT Pasar		12 Bulan	115,000,000	APBD		12 Bulan	126,500,000
3.30.03.2.0 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi		100%	700,000,000	APBD		100%	770,000,000
3.30.03.2.0 2.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	700,000,000	APBD		1 Dokumen	770,000,000
	Rincian :								
	Pembinaan Pegawai Pengelola Pasar Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai Pengelola Pasar yang dibina		70 Orang	700,000,000			70 Orang	770,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

3 30 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>		<b>29.00%</b>	<b>105,900,000</b>	<b>APBD</b>		<b>29.00%</b>	<b>110,088,000</b>
3 30 04 2.01	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase ketersediaan barang kebutuhan pokok</b>		<b>29.00%</b>	<b>100,080,000</b>	<b>APBD</b>		<b>29.00%</b>	<b>110,088,000</b>
3 30 04 2.01 01	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>		<b>9 Laporan</b>	<b>50,080,000</b>	<b>APBD</b>		<b>9 Laporan</b>	<b>55,088,000</b>
	<b>Rincian :</b>								
	<b>Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Sembako</b>	<b>Jumlah Pasar yang di Monitoring terkait dengan pelaporan sembako</b>		<b>9 Pasar</b>	<b>50,080,000</b>	<b>APBD</b>		<b>9 Pasar</b>	<b>55,088,000</b>
3 30 04 2.01 03	<b>Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>		<b>9 Laporan</b>	<b>50,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>9 Laporan</b>	<b>55,000,000</b>

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	<b>Rincian :</b>								
	<b>Operasi Pasar</b>	<b>Jumlah Pasar yang dimonitoring terkait dengan pelaporan sembako</b>		<b>9 Pasar</b>	<b>50,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>9 Pasar</b>	<b>55,000,000</b>
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Ekspor</b>		<b>5%</b>	<b>138,325,650</b>	<b>APBD</b>		<b>5%</b>	<b>77,000,000</b>
<b>3.30.05.2.0 1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase pertumbuhan IKM potensi ekspor</b>		<b>33%</b>	<b>70,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>33%</b>	<b>77,000,000</b>
<b>3.30.05.2.0 1.04</b>	<b>Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam misi dagang Produk Ekspor Unggulan</b>		<b>2 Pelaku Usaha</b>	<b>60,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Pelaku Usaha</b>	<b>66,000,000</b>
	<b>Rincian :</b>								
	<b>Pengembangan perdagangan antar daerah bagi produk ekspor</b>	<b>peningkatan volume ekspor dengan mengikuti misi dagang antar daerah</b>		<b>2 Pelaku Usaha</b>	<b>60,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Pelaku Usaha</b>	<b>66,000,000</b>
<b>3.30.05.2.0 1.06</b>	<b>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</b>	<b>Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina</b>		<b>10 Pelaku Usaha</b>	<b>10,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>10 Pelaku Usaha</b>	<b>11,000,000</b>
	<b>Rincian :</b>								

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	monitoring, pembinaan dan inventarisasi pelaku ekspor diwilayah kabupaten mojokerto	monitoring, pembinaan & inventarisasi bagi pelaku ekspor kab. Mojokerto sehingga tersedia data tentang pelaku ekspor & produk yang diekspor serta negara tujuan ekspor		10 Pelaku Usaha	10,000,000	APBD		10 Pelaku Usaha	11,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		94%	548,503,400	APBD		94%	709,500,000
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		5.00%				5.00%	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase wajib tera yang terlayani/ indeks kepuasan terhadap pelayanan tera dan tera ulang		94,37%	645,000,000	APBD		94,37%	709,500,000
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat Ukur,Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		25.000 Unit	477,000,000	APBD		25.000 Unit	524,700,000
	Rincian :								
	Operasional Tera/tera Ulang	memberikan perlindungan		54623		APBD		54623	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	<b>UTTP</b>	kepada konsumen terhadap kevalidan hasil ukur, takar, timbang		unit	230,000,000			unit	253,000,000
	<b>Pemeliharaan renovasi dan pembangunan sarana dan prasarana</b>	Jumlah gedung UPT Metrologi legal yang dipelihara dengan baik		1 Gedung		APBD		1 Gedung	
	<b>Dukungan Surveillance ( Assesi )</b>	Lolos dalam Audit oleh Kemendag dan ISO 9001:2015		1 Kali	57,000,000	APBD		1 Kali	62,700,000
	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kemetrolgian</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Kemetrolgian		14 Pegawai	190,000,000	APBD		14 Pegawai	209,000,000
<b>3 30 06 2.01 02</b>	<b>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</b>	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		600 Pelaku Usaha	160,000,000	APBD		600 Pelaku Usaha	176,000,000
	<b>Rincian :</b>								
	<b>Pendataan / Pemetaan Data Potensi dan Kondisi UTTP dan BDKT</b>	Menyediakan data potensi dan kondisi alat ukur takar timbang dan perlengkapannya di wilayah kabupaten mojokerto		18 kec	50,000,000	APBD		18 kec	55,000,000
	<b>Operasional Pengawasan UTTP</b>	Menciptakan tertib ukur dan perlindungan konsumen		18 kec	40,000,000	APBD		18 kec	44,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	Penyuluhan kemetrolgian melalui tatap muka, medis cetak, elektronika, internet	meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah tentang kemetrolgian sehingga taat melaksanakan tera - tera ulang alat UTTP		19 lokasi ( 18 kec dan 1 kawasan NIP )	30,000,000	APBD		19 lokasi ( 18 kec dan 1 kawasan NIP )	33,000,000
	operasional pengawasan BDKT	Menciptakan peredaran barang BDKT sesuai ketentuan Undang - undang		9 Jenis BDKT	30,000,000	APBD		9 Jenis BDKT	33,000,000
	Pembelian sampling BDKT	Agar mengetahui Legalitas BDKT, Kebenaran labelitas BDKT, Berat/ berat jenis BDKT		9 Jenis BDKT	5,000,000	APBD		9 Jenis BDKT	5,500,000
	Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja pengawasan	Menciptakan Kinerja Pengawasan berjalan lancar		2 alat Standar UTTP	5,000,000	APBD		2 alat Standar UTTP	5,500,000
3 30 06 2.01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal		1 Unit	8,000,000	APBD		1 Unit	8,800,000
	Rincian :								
	Operasionalisasi Penegakan Hukum	Proses pelimpahan perkara hasil pelanggaran pengawasan,		1 Kasus	8,000,000	APBD		1 Kasus	8,800,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		<b>terlaksananya pengawasan terhadap peraturan kemetrolagian</b>							
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase UMKM yang berkembang omzetnya</b>		<b>60%</b>	<b>506,096,000</b>	<b>APBD</b>		<b>60%</b>	<b>49,500,000</b>
<b>3 30 07 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Presentase UMKM yang berkembang Omsetnya</b>		<b>60.00%</b>	<b>45,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>60.00%</b>	<b>49,500,000</b>
<b>3 30 07 2.01 01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</b>		<b>8 UMKM</b>	<b>45,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>8 UMKM</b>	<b>49,500,000</b>
	<b>Rincian :</b>								
	<b>Promosi Potensi Daerah</b>	<b>Jumlah Promosi potensi daerah yang diikuti</b>		<b>4 Kali</b>	<b>45,000,000</b>			<b>4 Kali</b>	<b>49,500,000</b>
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitasi pemenuhan komitmen</b>		<b>15%</b>	<b>6,975,000</b>			<b>15%</b>	<b>11,000,000</b>
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>15%</b>	<b>10,000,000</b>			<b>15%</b>	<b>11,000,000</b>
	<b>Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang</b>		<b>8 Dokumen</b>	<b>10,000,000</b>			<b>8 Dokum</b>	<b>11,000,000</b>

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

								en	
	<b>Rincian :</b>								
	<b>Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perijinan tanda daftar gudang</b>	<b>jumlah tnda daftar gudang yang difasilitasi berupa produk BAP ( Berita acara pemeriksaan )</b>		<b>8 perusahaan</b>	<b>10,000,000</b>			<b>8 perusahaan</b>	<b>11,000,000</b>
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Tingkat Pertumbuhan Industri</b>		<b>1.50%</b>	<b>547,247,619</b>	<b>APBD</b>		<b>1.50%</b>	<b>990,000,000</b>
<b>3.31.02.2.0 1</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase peningkatan produktivitas IKM</b>		<b>2.00%</b>	<b>900,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>2.00%</b>	<b>990,000,000</b>
<b>3.31.02.2.0 1.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>100,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>110,000,000</b>
	<b>Rincian :</b>								<b>22,000,000</b>
	<b>Sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri</b>	<b>Jumlah Industri yang mengikuti sosialisasi</b>		<b>15 Perusahaan</b>	<b>20,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>15 Perusahaan</b>	<b>22,000,000</b>
	<b>Fasilitasi pendaftaran merk produk industri aneka dan tekstil</b>	<b>Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pendaftaran merk produk</b>		<b>30 IKM</b>	<b>30,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>30 IKM</b>	<b>33,000,000</b>

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		<b>industri aneka dan tekstil</b>							
	<b>Fasilitasi standarisasi produk IKM Agrokim</b>	<b>Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi produk IKM Agrokim</b>		<b>35 IKM</b>	<b>50,000,000</b>	<b>APBDP rov</b>		<b>35 IKM</b>	<b>55,000,000</b>
<b>3.31.02.2.0 1.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>800,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>4 Dokum en</b>	<b>880,000,000</b>
	<b>Rincian :</b>								
	<b>Bimbingan Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan IKM</b>	<b>Jumlah IKM yang mendapat bimbingan</b>		<b>25 IKM</b>	<b>85,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>25 IKM</b>	<b>93,500,000</b>
	<b>Kajian Pembentukan KIHT di Kab. Mojokerto</b>	<b>Jumlah dokumen yang tersusun</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>200,000,000</b>	<b>DBHCH T</b>		<b>1 Dokum en</b>	<b>220,000,000</b>
	<b>Pembinaan Pengusaha hasil tembakau di kab. Mojokerto</b>	<b>Jumlah Pengusaha Tembakau yang mendapatkan Pembinaan</b>		<b>40 Orang</b>	<b>50,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>40 Orang</b>	<b>55,000,000</b>
	<b>Desiminasi standarisasi Produk Industri Agro Kimia</b>	<b>Jumlah IKM yang mengikuti desiminasi</b>		<b>70 Orang</b>	<b>50,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>70 Orang</b>	<b>55,000,000</b>
	<b>Pendampingan</b>	<b>Jumlah IKM yang</b>		<b>15 IKM</b>		<b>APBD</b>		<b>15 IKM</b>	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

	Pengembangan usaha industri bagi Industri kecil dalam rangka IKM naik kelas	berlegalitas			100,000,000				110,000,000
	Pembinaan, pelatihan dan pendampingan servis elektronik yang terampil & terpercaya secara online	Jumlah IKM yang dibina		20 IKM	50,000,000	APBD		20 IKM	55,000,000
	Pelatihan bimbingan manajemen usaha industri bagi IKM kuningan,perak & monel	Jumlah IKM yang dibina		30 IKM	40,000,000	APBD		30 IKM	44,000,000
	Pembinaan, pelatihan dan pendampingan trend batik khas mojokerto & ecoprint	Jumlah IKM yang dibina		20 IKM	50,000,000	APBD		20 IKM	55,000,000
	Pembinaan, pelatihan dan kemasan produk IKM bagi aneka dan tekstil	Jumlah IKM yang dibina		30 IKM	60,000,000	APBD		30 IKM	66,000,000
	Pembinaan dan pelatihan teknik Pemetretan barang hasil produksi editing foto, fidio yang berkualitas dan pemasaran online	Junlah IKM yang dibina		30 IKM	40,000,000	APBD		30 IKM	44,000,000
	Pembinaan Industri kecil hasil hutan	Jumlah IKM yang dibina		20 IKM	75,000,000	APBD		20 IKM	82,500,000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib		55%	91,182,800	APBD		55%	77,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		<b>Lapor data Industri</b>							
<b>3.31.03.2.0 1</b>	<b>Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>	<b>Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas</b>		<b>55%</b>	<b>70,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>55%</b>	<b>77,000,000</b>
<b>3.31.03.2.0 1.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI ,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasab Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perzinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>70,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dokum en</b>	<b>77,000,000</b>
	<b>Rincian :</b>								
	<b>Pengawasan dan Pembinaan IKM di Wilayah Kabupaten Mojokerto</b>	<b>Jumlah pengawasan &amp; pembinaan ke industri</b>		<b>70 Industri</b>	<b>70,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>70 Industri</b>	<b>77,000,000</b>

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini</b>		<b>50%</b>	<b>77,850,000</b>	<b>APBD</b>		<b>50%</b>	<b>93,500,000</b>
	<b>Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota</b>	<b>Prosentase pengumpulan data industri berbasis sistem informasi</b>		<b>50%</b>	<b>85,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>50%</b>	<b>93,500,000</b>
	<b>Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sisem Informasi Industri Nasional ( SIINas)</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>85,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>93,500,000</b>
	<b>Rincian :</b>								
	<b>Upditing data industri Kabupaten Mojokerto</b>	<b>Jumlah industri yang terdata</b>		<b>4000 Industri</b>	<b>85,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>4000 Industri</b>	<b>93,500,000</b>
<b>JUMLAH</b>					<b>12,194,280,996</b>				<b>13,262,100,000</b>

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

## BAB 4

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024, mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021- 2026 serta mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, dan hasil penelaahan usulan masyarakat/pemangku kepentingan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD 2024.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp 14.241.891.808,-**(Empatbelas milyar Duaratus Empatpuluh satu Juta Delapanratus Sembilanpuluh Satu Ribu Delapanratus delapan Rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Kab. Mojokerto

MATRIK RENCANA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2024

KODE SKPD		3.06.01													
NAMA SKPD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	UUSULAN APBD KAB (Rp)	APBD KAB (Rp)		USULAN APBN			KET
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan Indikator Tujuan : PDRB	-	-		-	-				0,00		0,00	-	
			-	-		-	-				0,00		0,00	-	
					<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel</b>	<b>Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	60								
						<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	80								
						<b>Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi</b>	1								

1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-			8.383.082.820		0,00	0,00	-	
					Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		90%	Disperindag	8.383.082.820					
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	Disperindag	15.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen Renstra, Renja APBD dan Renja PAPPD	4 Dokumen		7.500.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Laporan Evaluasi Kinerja Tribunal, Laporan LKjIP dan Laporan SAKIP	3 Laporan		7.500.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	Disperindag	6.421.843.000					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		54 Orang		6.421.843.000					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				IP ASN Perangkat Daerah	73		25.000.000					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		12 Orang		25.000.000					Bimtek
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	Disperindag	386.912.900					

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

					Sesuai Kebutuhan									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	....Paket								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket		53.193.900						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36 Paket		73.397.000						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket		66.744.400						
		Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		103.577.600						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		25.000.000		25.000.000,00				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan		50.000.000		50.000.000,00				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		15.000.000		10.000.000,00				
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>		<b>753.100.000</b>						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		570.500.000						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		182.600.000		177.600.000,00				gaji administrasi, kebersihan, keamanan & senam
		<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>254.420.650</b>						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 Unit		139.725.650						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	1 Unit		114.695.000						
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>526.806.270</b>						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit		23.140.650		22.460.500,00				
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit		503.665.620		442.945.944,00				
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>						<b>2.640.250.338</b>						
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						1.648.675.625						
					<b>Persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar</b>	<b>93%</b>								
					<b>persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun dan terkelola</b>	<b>86%</b>								

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		295.000.000		0,00				
		Rincian:												
		MCK pasar kutorejo						100.000.000						
		paving pasar dinoyo						100.000.000						
		pengadaan tenda						80.000.000						
		pemeliharaan gorong-gorong PPST						15.000.000						
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit		1.353.675.625						
		Rincian:												
		Pemeliharaan Kebersihan Pasar			Jumlah Pasar yang dibersihkan	10 Pasar		1.193.675.625						
		Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Sehat			Jumlah pedagang yang mndapat fasilitas dan pembinaan pasar sehat	40 Pedagang		60.000.000						
		Operasionalisasi Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST)			Jumlah Waktu Operasionla PPST	12 Bulan		20.000.000						
		Operasional UPT Pasar			Jumlah operasional UPT Pasar	12 Bulan		80.000.000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>			<b>Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>		<b>991.574.713</b>						
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen		991.574.713						
		Rincian:												
		peningkatan & pengelolaan SDM distribusi perdagangan		Jumlah SDM yang dibina		38 orang		991.574.713						
		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			<b>Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>29%</b>		<b>155.900.000</b>						
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Prosentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	29%		155.900.000						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12 Laporan		55.900.000		44.900.000,00				
		Rincian:												
		Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Sembako		Jumlah Pasar yang dimonitoring terkait dengan pelaporan sembako		9 pasar		55.900.000						
		Pengawasan Barang & kegiatan perdagangan		Jumlah Laporan pengawasan barang & kegiatan perdagangan		12 laporan								

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		2 Laporan		100.000.000						
		Rincian:												
		Operasi Pasar		Jumlah Operasi pasar yang dilakukan		2 kali		100.000.000						
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			<b>Persentase Pertumbuhan Ekspor</b>	<b>15%</b>		<b>278.325.650</b>						
		<b>Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Persentase pertumbuhan IKM potensi Ekspor</b>	<b>33%</b>		278.325.650						
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam misi dagang Produk Ekspor Unggulan		3 Pelaku Usaha		150.000.000		59.311.000,00				
		Rincian:												
		Misi Dagang		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi		3 Pelaku usaha		150.000.000						
		Pembinaan pelaku usaha ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina		20 Pelaku Usaha		8.325.650		8.325.650,00				
		Rincian:												
		Monitoring & pembinaan pelaku usaha		Jumlah Pelaku usaha yang dibina		20 Pelaku usaha		8.325.650						
		Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang		4 Pelaku Usaha		120.000.000		usulan				
		rincian :												
		Pameran Dagang berorientasi ekspor		Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang		4 Pelaku Usaha		120.000.000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Persentase alat UTPP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	94%								
					Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%		1.062.789.450						
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			Persentase wajib tera yang terlayani/ indeks kepuasan terhadap pelayanan tera dan tera ulang	94,37%		1.062.789.450						
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat Ukur,Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		31627 Unit		443.515.400	420.515.400,00					
		Rincian:												
		Operasional Tera / Tera Ulang UTPP		Terlaksananya tera/tera ulang alat UTPP Metrologi Legal		31627 unit		223.515.400	340.515.400,00					
		Dukungan Surveillance ( Assesi )		Lolos dalam audit oleh kemendag, ISO 9001-2015 dan SMAP (ISO 37001-2016)		1 Dokumen		30.000.000	40.000.000,00					
		Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemetrolgian		Terlaksananya pengembangan SDM Kemetrolgian		10 SDM dan 3 Jabatan Fungsional		190.000.000	40.000.000,00					
		pengadaan sarana prasarana standart kemetrolgian		jumlah alat standart kemetrolgian		3 Unit								
		Rehab Gedung kantor UPT Metrologi legal		Jumlah gedung yang direhab		1 Gedung								
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		120 Pelaku Usaha		619.274.050	120.000.000,00					
		Rincian:												

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Pendataan / Pemetaan Data Potensi dan Kondisi UTTP dan BDKT		Jumlah pelaku usaha pemakai UTTP dan jumlah pelaku usaha produk BDKT		3000 UTTP & 3000 BDKT		122.800.000		45.000.000,00				
		Operasional Pengawasan UTTP		jumlah alat UTTP yang diawasi		800 UTTP		115.686.050		25.000.000,00				
		Penyuluhan kemetrolagian melalui tatap muka, medis cetak, elektronika, internet		Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan kemetrolagian legal		120 peserta		120.000.000		20.000.000,00				
		operasional pengawasan BDKT		Jumlah BDKT yang diawasi		3000 BDKT		142.800.000		20.000.000,00				
		Pembelian sampling BDKT		Jumlah jenis BDKT yang disampling		4 jenis		5.000.000		5.000.000,00				
		Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja pengawasan		jumlah jenis alat standart pengawasan metrologi legal		5 jenis		20.000.000		5.000.000,00				
		Pelatihan Fungsional Pengawasan Kemetrolagian		jumlah fungsional pengawasan kemetrolagian yg mengikuti pelatihan		2 orang		57.988.000						
		Pelaksanaan magang, coaching, Bimtek ke BSML / Ditmet		jumlah ASN Kemetrolagian yang mengikuti Bimtek		8 Orang		35.000.000						
		Penyidikan Metrologi Legal		Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal		1 Unit		0		7.988.000,00				
		Rincian:												

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Operasionalisasi Penegakan Hukum		1. Proses pelimpahan perkara hasil pelanggaran pengawasan; 2. terlaksananya pengawasan terhadap peraturan kemetrolgian		1 obyek		0		7.988.000,00				
		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>				<b>Persentase UMKM yang berkembang omzetnya</b>	<b>60%</b>	<b>506.095.000</b>						
		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>				<b>Presentase PDN yang di gunakan</b>	<b>0,10%</b>	506.095.000						
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		42 UMKM		331.095.000		321.095.000,00				
		Rincian:												
		promosi potensi daerah		Jumlah UMKM yang mengikuti pameran		42 UMKM		321.095.000						
		Pendataan pendapatan UKM/IKM		jumlah pendapatan UKM/IKM yang terdata		25 UKM/IKM		10.000.000						
		Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail ,marketplace, perhotelan, jasa akomodasi		100 UMKM		140.000.000		0,00				
		Rincian :												
		Pembinaan terhadap pelaku usaha produk dalam negeri		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kurasi kemitraan dengan retail dan marketplace		100 pelaku usaha		70.000.000						
		Pembinaan seller kurir & admin tumbas		Jumlah seller kurir & admin tumbas yang dibina		200 Orang		70.000.000						
		peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan		1 Dokumen		35.000.000		0,00				

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Rincian :											
		peningkatan sistem dan jaringan aplikasi sinergi smart		Jumlah aplikasi yang dikelola		1 Aplikasi		35.000.000					
		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>				<b>Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitasi pemenuhan komitmen</b>		6.975.000					
		<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>				<b>Jumlah TDG yang di terbitkan</b>		6.975.000					
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		16 Dokumen		6.975.000					
		Rincian:											
		fasilitasi pemenuhan komitmen Tanda daftar gudang ( TDG)		Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pemenuhan komitmen TDG		16 Pelaku usaha		6.975.000					
		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>				<b>Tingkat Pertumbuhan Industri</b>		873.473.550					
		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>				<b>persentase peningkatan produktivitas IKM</b>		873.473.550					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		jumlah dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan , penyebaran dan perwilayahan industri		2 Dokumen		0					
		Rincian:											
		penyusunan masrter palnn KIHT di kab mojokerto		jumlah penyusunan amdal dan lain-lain		2 Dokumen		0					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi , dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		2 Dokumen		140.000.000		0,00			

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Rincian :												
		peingkatan kapasitas sumber daya industri melalui bimtek ijin edar produk minuman dan makanan beku bagi pelaku industri kecil menengah			Jumlah sumber daya industri IKM yang mengikuti bimtek		30 IKM		70.000.000					
		peningkatan sumber daya industri melalui bimbingan cara pengolahan obat yang baik (CPOB) bagi pelaku IKM obat tradisional			Jumlah sumber daya industri IKM yang mengikuti bimtek		30 IKM		70.000.000					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		4 Dokumen		279.704.800		88.444.000			
		Rincian:									88.444.000			
		Fasilitasi sertifikasi halal			Jumlah sertifikat hala bagi IKM		50 sertifikat		81.260.800					
		fasilitasi merek gratis bagi Industri			Jumlah IKM yang mempunyai merek		100 orang		88.444.000					
		sosialisasi sertifikat TKDN bagi Industri Kecil			Jumlah industri kecil yang mengikuti sosialisasi sertifikat TKDN		40 orang		30.000.000					
		sosialisasi sertifikat industri Hijau bagi Industri			Jumlah industri yang mengikuti sosialisasi sertifikat industri hijau		40 orang		30.000.000					

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Pendataan mesin pelintir rokok di kabupaten mojokerto		jumlah mesin pelintir rokok di kabupaten mojokerto	20 Unit	50.000.000							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8 Dokumen	453.768.750	246.580.768,00						
		Rincian:											
		Pembinaan dan Pelatihan menjahit bagi IKM		Jumlah Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan dan Pelatihan Jahit bagi IKM	15 orang	25.000.000	246.580.768,00						
		Pembinaan dan Pelatihan pembuatan handycraf dari kain perca		Jumlah IKM Handycraft yang telah dibina dan dilatih menggunakan bahan kain perca	15 orang	43.768.750							
		pembinaan dan pelatihan batik cap ciri khas kearifan lokal		Jumlah IKM yang telah dibina dan dilatih batik cap ciri khas kearifan lokal	10 orang	40.000.000							
		pembinaan dan pelatihan batik tulis pewarna lokal ciri khas kearifan lokal		Jumlah IKM yang telah dibina dan dilatih batik tulis pewarna lokal ciri khas kearifan lokal	20 orang	80.000.000							
		Pembinaan dan Pelatihan pembuatan desain cor kuningan dengan menggunakan 3D Printer		Jumlah IKM cor kuningan yang telah diberi binaan dan pelatihan pembuatan desain cor kuningan dengan menggunakan 3D printer	15 orang	40.000.000							
		Bimbingan Pemberdayaan industri dan sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto		Jumlah IKM yang diberdayakan kelembagaannya	1000 IKM	85.000.000							
		pendampingan pengembangan usaha industri bagi IKM		jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	40 IKM	100.000.000							

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Pelatihan penumbuhan wira usaha baru kerajinan khas Mojopahit		jumlah peserta yang dilatih		25 peserta		40.000.000					
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>				<b>Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laport data Industri</b>	<b>55%</b>	<b>235.000.000</b>					
		<b>Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>				<b>Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas</b>	<b>55%</b>	<b>235.000.000</b>					
		Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUIUKI dan IPKI kewenangan kab/kota dalam sistem informasi industri nasional yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)		Jumlah Dokumen fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perijinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS		24 Dokumen		35.000.000		0,00			
		Rincian:											
		Fasilitasi dan pendampingan pemenuhan komitmen perolehan IUI, ijin perluasan industri, ijin usaha kawasan industri & ijin perluasan kawasan industri yang menjadi kewenangan kab/kota		Jumlah verifikasi teknis yang dilaksanakan		24 Dokumen		35.000.000					

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasab Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perzinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		200.000.000		66.182.800,00				
		Rincian:												
		Pengawasan dan Pembinaan IKM di Wilayah Kabupaten Mojokerto		Jumlah pengawasan dan pembinaan IKM di wilayah kab. Mojokerto		120 industri		200.000.000						
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>			<b>Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini</b>	<b>50%</b>		<b>100.000.000</b>						
		<b>Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota</b>			<b>Prosentase pengumpulan data industri berbasis sistem informasi</b>	<b>50%</b>		<b>100.000.000</b>						
		Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen		100.000.000						
		Rincian:												
		Updating Data Industri Kabupaten Mojokerto		- Jumlah Data Industri se Kabupaten Mojokerto		1500 data		100.000.000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

		JUMLAH TOTAL						14.241.891.808						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan secara singkat bahwa rumusan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 tersebut di arahkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perindustrian dan Perdagangan serta mendukung pencapaian misi ke 2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yaitu *“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.”*

Tujuan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) sasaran. Sasaran pertama adalah meningkatnya Daya Beli Masyarakat dengan indikator Indeks Daya Beli. Target yang harus dicapai pada Tahun 2024 adalah sebesar 0.789%. Guna mewujudkan tercapainya target indikator tersebut, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

**1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan .**

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ini diarahkan untuk dapat , serta meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan . Program ini dilaksanakan oleh Bidang Bina Usaha Perdagangan. Adapun target indikator program yang ingin dicapai pada Tahun 2024 yaitu peningkatan persentase sarana distribusi perdagangan dengan target sebesar 93% dengan jumlah total kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 2.6250.336.000 dan 2 (dua ) kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten.

**2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini diarahkan untuk dapat serta meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program ini dilaksanakan oleh bidang usaha perdagangan ,adapun target indicator program tersebut pada tahun 2024 yaitu Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 29% dengan pendanaan anggaran sebesar Rp. 155.900.000 dan 1 ( Satu) kegiatan bersumber dari dana APBD.

Untuk sasaran yang kedua adalah Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah dengan indicator persentase angka perdagangan dalam daerah ( Ekspor) dengan target yang dicapai ditahun 2024 sebesar 5%, adapun sasaran kedua didukung dengan program sebagai berikut :

### **1. Program Pengembangan Ekspor**

Program Pengembangan Ekspor ini diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dengan menumbuhkan ekspor didalam negeri,Program ini didukung oleh bidang usaha perdagangan ditahun 2024 dengan indicator persentase pertumbuhan ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 278.325.650 dengan didukung 1 (satu) kegiatan.

### **2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan ini diarahkan untuk meningkatnya ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitasi pemenuhan komitmen,program ini didukung oleh bidang usaha perdagangan ditahun 2024 dengan indicator tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitasi pemenuhan komitmen dengan pendanaan sebesar Rp.6.975.000 dengan didukung 1 (satu) kegiatan.

### **3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ini diarahkan untuk meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program ini didukung oleh bidang usaha perdagangan ditahun 2024 dengan indicator persentase UMKM yang berkembang omzetnya dengan pendanaan sebesar Rp. 506.095.000 dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan.

### **4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program Standarisasi dan Pemasaran Perlindungan Konsumen ini diarahkan untuk peningkatan standarisasi dan pemasaran perlindungan konsumen, program ini didukung oleh bidang metrologi legal ditahun 2024 dengan indicator persentase alat UTPP ditera-tera ulang dan persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku dengan pendanaan sebesar Rp. 1.062.789.450 dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan.

Untuk sasaran yang ketiga adalah Meningkatnya Produktivitas dan Daya saing dengan indicator persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik kelas dengan target yang dicapai ditahun 2024 sebesar 3%, adapun sasaran ketiga didukung dengan program sebagai berikut :

#### **1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program Perencanaan dan pembangunan industri ini diarahkan untuk merencanakan dan mengembangkan pembangunan industry yang ada

dikabupaten mojokerto untuk kedepanya, program ini didukung oleh dua bidang meliputi bidang industry kimia & agro (IAK) dan industry logam,mesin,,alat transportasi dan elektronika (ILMATE) ditahun 2024 dengan indicator tingkat pertumbuhan industry dengan anggaran sebesar Rp.873.473.550.

**2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri ini diarahkan**

Program pengendalian izin usaha industry ini diarahkan untuk monitoring serta pengendalian dalam izin berusaha khususnya dibidang industry di wilayah kabupaten mojokerto,program ini didukung oleh satu bidang industry yaitu bidang industry agro & kimia (IAK) ditahun 2024 dengan indicator tingkat kepatuhan industry untuk tertib lapor data industry dengan anggaran sebesar Rp. 235.000.000

**3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**

Program pengelolaan system informasi industry nasional (SIINAS) ini diarahkan untuk mengelola system informasi industry khususnya di wilayah kabupaten mojokerto ,program ini didukung oleh satu bidang industry yaitu bidang industry logam,mesin,alat transportasi dan elektronika (ILMATE) ditahun 2024 dengan indicator tingkat ketersediaan informasi industry secara lengkap & terkini dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah 5 (lima) Tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Mojokerto serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun aksi plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) dalam rangka hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran tanggungjawab / tugas yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Dinas Perdagangan dan perindustrian ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Adapun yang perlu mendapatkan perhatian untuk menjadi program prioritas yakni adanya kebijakan nasional terkait penyusunan RPIK serta pengaruhnya ke depan terkait program/kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendukung itu

Akhirnya, semoga Rencana KerjaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, Juni 2023

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MOJOKERTO



**M. IWAN ABDILLAH. SH.,S.Sos.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004